Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

   Pelaksanaan Kelurahan/Desa (PKD) telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam aspek pencegahan, PKD melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang serta pentingnya menjaga integritas pemilu. Dalam aspek pengawasan, PKD aktif memantau seluruh tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye, aktivitas tim sukses, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Apabila ditemukan dugaan praktik politik uang, PKD melakukan penanganan awal melalui penerimaan laporan, penelusuran informasi, pengumpulan data, serta meneruskan temuan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, PKD juga menjalin koordinasi dengan Panwaslu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, pemerintah desa, kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan guna memperkuat pengawasan pemilu. Dengan demikian, PKD memiliki peran yang strategis dalam menjaga pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 agar berlangsung secara jujur dan adil.

2. Kendala yang Dihadapi pelaksanaan Kelurahan/Desa (PKD) dalam Penanganan Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan politik uang, PKD menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut meliputi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya politik uang, sehingga sebagian masyarakat masih menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, politik uang umumnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga sulit dibuktikan karena minimnya bukti dan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi hambatan karena adanya rasa takut, hubungan kekeluargaan dengan pelaku, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan. Di samping itu, keterbatasan jumlah personel pengawas, luas wilayah pengawasan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, budaya politik transaksional yang masih berkembang, serta keterbatasan waktu dalam proses penanganan

pelanggaran turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi peran PKD dalam menangani praktik politik uang.

3. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir

Efektivitas peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran selama tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2024. Kehadiran PKD mampu meningkatkan pengawasan terhadap peserta pemilu, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas. Namun demikian, efektivitas tersebut belum mencapai tingkat yang optimal karena masih ditemukan praktik politik uang di tengah masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, serta masih kuatnya budaya politik transaksional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, intensifikasi pendidikan politik, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar efektivitas peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat semakin meningkat dan tujuan mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan demokratis dapat tercapai secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PKD, perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang serta memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pemilu agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
2. Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan, perlu memberikan pembinaan, pelatihan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan efektivitas kinerja PKD dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, diharapkan berperan aktif dalam mengajak masyarakat menolak praktik politik uang dan membangun budaya demokrasi yang jujur serta berintegritas.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih sadar akan bahaya politik uang, berani menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik, serta aktif melaporkan pelanggaran kepada pengawas pemilu.
5. Bagi Peserta Pemilu, hendaknya menjalankan kampanye sesuai ketentuan yang berlaku dan menghindari praktik politik uang demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Dengan adanya kerja sama antara PKD, Bawaslu, pemerintah desa, peserta pemilu, dan masyarakat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga kualitas demokrasi dan integritas pemilu dapat semakin meningkat.